

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan berbasis Islam yang berdiri di Kampung Kauman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau yang bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 (Majelis Diklitbang dan LPI PP Muhammadiyah, 2010). Kyai Haji Ahmad Dahlan, selanjutnya disingkat KHA Dahlan merupakan pelopor sekaligus pendiri organisasi keagamaan ini (Febriansyah & dkk, 2013). Disamping dikenal sebagai organisasi keagamaan, Muhammadiyah juga dikenal sebagai organisasi sosial keagamaan yang bergerak aktif dalam bidang kemanusiaan (Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, 2010). Teologi Al-Ma'un adalah pedoman bagi Muhammadiyah dalam menjalankan setiap misi kemanusiaannya, sesuai dengan pesan pendiri Muhammadiyah, KHA Dahlan (Aji, 2016).

Menurut Fariyah (2014) Gerakan kemanusiaan Muhammadiyah sudah dimulai pada tahun 1920. Awal gerakan kemanusiaan Muhammadiyah muncul dari pemikiran Haji Muhammad Syudjak yang ingin membuat rumah sakit (Febriansyah & dkk, 2013). Penolong Kesengsaraan Umum (PKU) merupakan salah satu lembaga kemanusiaan Muhammadiyah yang berdiri tahun 1918, yang kemudian pada tahun 1921 resmi menjadi bagian khusus

dari Muhammadiyah. PKU Muhammadiyah merupakan salah satu bentuk nyata dari aktivitas kemanusiaan khususnya dalam bidang kesehatan yang dimiliki oleh Muhammadiyah selama berkiprah dalam satu abad pertama. Pada tahun 2007, pasca peristiwa Tsunami Aceh tahun 2004, Muhammadiyah kembali menginisiasi lembaga kemanusiaan yang bekerja khusus dalam bidang kebencanaan (Nurkhasanah, 2014). Pada saat itu Muhammadiyah membentuk lembaga kebencanaan dengan nama Pusat Penanggulangan Bencana. Pada Muktamar ke 46 pada tahun 2010, lembaga tersebut diubah dan ditetapkan menjadi Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) atau dalam sebutan berbahasa Inggris yakni *Muhammadiyah Disaster Management Center* (MDMC) yang selanjutnya disingkat dengan MDMC (Aji, 2016). MDMC merupakan Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) yang khusus menjalankan aktivitas kemanusiaan universal dan bergerak khusus dalam bidang kebencanaan untuk pengurangan resiko bencana (Lembaga Penanggulangan Bencana, 2012).

Keterlibatan Muhammadiyah melalui MDMC, tidak hanya terlibat dalam aktivitas kemanusiaan di dalam negeri namun juga ikut terlibat aktif dalam aktivitas kemanusiaan di luar negeri. Eksistensi Muhammadiyah dikancah Internasional sebagai salah satu aktor kemanusiaan melalui MDMC ini semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya aktivitas-aktivitas yang diikuti MDMC dalam mengoptimalkan perannya di

skala internasional. Aktivitas MDMC dalam bidang kebencanaan tidak hanya cepat merespon isu kebencanaan di Indonesia, namun turut berpartisipasi aktif dalam isu kebencanaan Internasional. Menurut Rahmawati Husein (2016) pada lima tahun terakhir ini, Muhammadiyah melalui MDMC telah mengirimkan misi bantuan kemanusiaan internasional pada peristiwa Topan Haiyan di Filipina dan Gempa Bumi di Nepal. Muhammadiyah juga aktif terlibat dalam forum-forum kemanusiaan Internasional seperti keterlibatan MDMC dalam penyusunan Bangkok Principles tahun 2016 (Suara Muhammadiyah, 2016). Muhammadiyah juga aktif dalam pelatihan-pelatihan tanggap bencana yang dilaksanakan di Mesir, Bangkok, Singapura, dan Filipina (Corona, 2016). Dari berbagai keterlibatan MDMC dalam aktivitas kemanusiaan internasional, keterlibatan *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* pada peristiwa Gempa bumi yang melanda wilayah Nepal tahun 2015 akan menjadi fokus utama dalam pembahasan pada penelitian ini.

Nepal adalah sebuah kerajaan kecil yang terletak di Asia Selatan, tepatnya terletak diantara India dan China. Diapitnya Nepal oleh dua negara yakni India dan China tersebut memberikan pengaruh dalam munculnya berbagai macam etnis, budaya, dan agama dalam masyarakat Nepal. Lynn Bennet, dkk (2008) dalam "*Caste, Ethnic and Regional Identity in Nepal*" menjelaskan bahwa wilayah Nepal mayoritas di dominasi oleh etnik atau

kepercayaan Hindunism. Kondisi geografis negara Nepal yang dikelilingi oleh rentetan barisan gunung, perbukitan, sungai, hingga jurang membuat bencana alam berupa Gempa bumi kerap terjadi di wilayah ini (Rasmid & dkk, 2015).

Pada tanggal 25 April 2015, bencana alam menimpa negara Nepal. Dalam Berita yang dilansir oleh BBC Indonesia (2015) Gempa bumi berkekuatan 7,8 Skala Richter mengguncang kawasan antara ibukota Kathmandu dan Kota Pokhara. Getaran gempa juga dirasakan di wilayah sekitarnya yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa di India, Bangladesh, Tibet, hingga kawasan pegunungan Mount Everest. Pada tanggal 12 Mei tahun 2015, gempa bumi susulan kembali melanda negara ini. Gempa bumi susulan ini berkekuatan 7,3 Skala Richter dengan pusat gempa di antara kota Dolakha tepatnya yakni di sebelah timur ibukota Kathmandu (UNOCHA, 2015). Gempa bumi yang terjadi selama dua kali berturut-turut tersebut telah menelan korban jiwa sedikitnya 8.316 orang dan 17.866 lainnya luka-luka (UNOCHA, 2015). Angka ini masih terus bertambah hingga mencapai hari ke ketiga setelah terjadinya gempa. Kerusakan infrastruktur juga terjadi di seluruh bagian Kota Nepal. Sedikitnya 15.001 bangunan milik pemerintah dan 288,797 bangunan umum masyarakat hancur akibat gempa bumi tersebut. Adapun daerah-daerah terdampak bencana yang mendapatkan efek cukup parah seperti Gorkha, Dhading, Nuwakot, Rasuwa, Kantipur, Dolakha, dan lain sebagainya (UNOCHA, 2015).

Dalam penanggulangan bencana, terdapat sistem kemanusiaan Internasional yakni *On-Site Operations Coordination Center* atau yang selanjutnya akan di singkat dengan OSOCC. OSOCC merupakan sebuah pedoman mekanisme dan prosedur respon cepat dalam situasi darurat kemanusiaan yang dibentuk oleh *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA)* pada tahun 1991 (UNOCHA, 2014). *On-Site Operations Coordination Center (OSOCC)* memiliki platform khusus untuk koordinasi respon bantuan kemanusiaan Internasional pada saat terjadi situasi tanggap darurat. Prosedur mekanisme kemanusiaan Internasional ini dibentuk sebagai upaya untuk mendukung peran pemerintah terdampak bencana dalam hal manajemen koordinasi dan informasi dalam situasi tanggap darurat di seluruh negara di dunia. Dalam prosedur mekanisme kemanusiaan Internasional ini masuk terlibat didalamnya seperti peran negara, militer, dan organisasi-organisasi kemanusiaan lainnya baik yang berada di dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, Nepal merupakan negara yang sudah menggunakan pedoman *On-Site Operations Coordination Center (OSOCC)* dalam menghadapi situasi darurat bencana, seperti gempa bumi Nepal yang terjadi pada tahun 2015.

Kondisi Nepal setelah peristiwa tersebut ternyata mempengaruhi stabilitas pemerintah Nepal selaku pengambil keputusan utama di Nepal. Hal ini kemudian berdampak pada keterlambatan distribusi pemerintah dalam hal

peyaluran bantuan kemanusiaan di beberapa wilayah terdampak yang sulit dijangkau (BBC INDONESIA, 2015). Adanya penolakan bantuan kemanusiaan luar negeri oleh pemerintahan Nepal terhadap bantuan yang datang dari Taiwan (Samosir, 2015). Pengiriman bantuan kemanusiaan oleh beberapa lembaga internasional juga mengalami hambatan yakni terjadi penumpukan bantuan kemanusiaan di bandara perbatasan antara India dan Nepal (UCANEWS, 2015). Hal tersebut dikarenakan kecilnya bandara yang terdapat di Nepal serta adanya mekanisme perizinan pendaratan yang harus dilalui oleh seluruh pendonor bantuan kemanusiaan.

Berkaitan dengan peristiwa tersebut, Indonesia turut ikut serta dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Nepal dengan mengirimkan beberapa perwakilannya. Indonesia mengirimkan beberapa perwakilannya seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Palang Merah Indonesia (PMI), Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), serta termasuk didalamnya *Muhammadiyah Disaster Management Center* (MDMC) (Rahmawati Husein S. M., 2016). Muhammadiyah melalui MDMC merupakan satu-satunya organisasi sosial keagamaan yang terlibat langsung dalam pengiriman misi tersebut.

Dalam menjalankan aktivitas kemanusiaan Internasional MDMC menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan pengalaman dalam

menjalankan operasi lapangan besar di luar negeri mengingat bahwa MDMC merupakan lembaga kemanusiaan yang belum lama berdiri (Aji, 2016). Keterbatasan dana yang dimiliki MDMC, dimana dana utama yang dimiliki Muhammadiyah dalam melaksanakan aktivitas kemanusiaan hanya berasal dari dana anggota dan masyarakat secara luas yang masih tersebar (Latief, 2017). Keterbatasan peran aktor non-pemerintahan dalam melaksanakan aktivitas kemanusiaan di luar batas negara, hal ini terkait dengan beberapa mekanisme dan prosedur yang dimiliki oleh Pemerintahan Indonesia yang harus dipenuhi oleh aktor kemanusiaan dalam melaksanakan aktivitasnya di luar batas negara. Serta adanya prosedur atau mekanisme Internasional yang dimiliki oleh sebuah negara terkait mekanisme penerimaan bantuan kemanusiaan dari luar negeri. Hal tersebut diatas berkaitan dengan mengingat bahwa MDMC merupakan lembaga kemanusiaan yang belum lama berdiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta-fakta pada uraian latar belakang diatas, serta permaran tentang kendala yang akan dimiliki Muhammadiyah melalui *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)*, maka muncul rumusan masalah seperti berikut: **“Bagaimana peran Muhammadiyah dalam misi kemanusiaan Internasional pada peristiwa gempa Nepal tahun 2015?”**

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan rumusan masalah yang telah terbentuk, maka untuk mengetahui peran Muhammadiyah dalam menjalankan misi bantuan kemanusiaan ke Nepal tahun 2015, penulis menggunakan beberapa konsep, antara lain :

1. Konsep Non-Governmental Organization (NGO)

Menurut *Code of Conduct* yang didukung oleh *International Crescent Committee of the Red Cross (ICRC)* dalam Lisa Witzig Davidson, dkk (1996, p. 6) menjelaskan bahwa *non-governmental organizations (NGO)* adalah organisasi baik skala nasional maupun internasional yang terbentuk secara independen tanpa adanya intervensi dari pemerintahan di sebuah negara dimana organisasi tersebut terbentuk. *Non-governmental organizations (NGO)* mempunyai bentuk yang beragam, hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan yang dimiliki seperti struktur organisasi, sumber dana yang dimiliki, ikatan nasional, fokus aktivitas, maupun akses yang digunakan (Davidson & dkk, 1996).

Dalam artikel *What is an Non-Governmental Organization?* yang ditulis oleh Peter Willetts (Willetts, p. 2) menjelaskan bentuk NGO menurut strukturnya dijelaskan dalam *local NGO, national NGO, regional NGO*, dan *Global NGO*. *Local NGO* atau *national*

NGO dijelaskan sebagai sekelompok individu yang bekerja dalam aktivitas lokal yang mengkoordinasikan kegiatannya kepada provinsi yang memiliki kantor pusat di Ibukota di sebuah negara (Willetts, pp. 5-7). Dalam level global, seluruh bentuk NGO memiliki keterlibatannya. Hal tersebut ditunjukkan dalam artikelnya bahwa pada tahun 1990an, organisasi non-pemerintahan nasional (*national NGO*) sudah mulai aktif berperan dalam isu-isu berskala global. Sehingga hal tersebut menjadikan istilah NGO mulai saat itu dapat mewakili peran baik NGO yang masih berskala lokal, nasional, maupun Internasional dalam level global (Willetts, pp. 5-7).

Keterlibatan peran *Non-Governmental Organization (NGO)* terkait misi kemanusiaan khususnya dalam kompleksitas situasi tanggap darurat kemanusiaan dijelaskan dalam jurnal yang ditulis oleh Lisa Witzig Davidson, dkk (1996) mengenai peran NGO dalam aktivitas bencana alam (*natural disaster*):

“The experiences in Iraq, Somalia, Haiti, and Rwanda have proven that closer coordinating among NGOs and the military can more effectively serve the goal of delivering humanitarian assistance in complex humanitarian emergencies. A variety of organizations now serve as coordinating mechanisms between government/international organization representatives, the military, and NGOs, among NGOs themselves, and between NGOs and the military” (Davidson & dkk, pp. 14-15)

Davidson, dkk (1996) menjelaskan peran NGO dalam situasi darurat bencana dengan memaparkan keberhasilan peran beberapa NGO yang bekerja dalam situasi krisis di beberapa negara seperti di Iraq, Somalia, Haiti, dan Rwanda sebagai penghubung antara pendonor bantuan dengan negara terdampak bencana, serta dengan lembaga-lembaga kemanusiaan Internasional. Davidson & dkk (1996) menjelaskan pentingnya koordinasi yang dilakukan NGO dalam melaksanakan aktivitas kemanusiaan dalam situasi darurat. Koordinasi yang dimaksud yakni peran dalam mengkoordinasikan dengan pemerintahan/militer, lembaga-lembaga Internasional yang terlibat dalam aktivitas tersebut, maupun bersama dengan sesama NGO yang terlibat di wilayah terdampak bencana. Koordinasi dan komunikasi ini dianggap dapat mempermudah dalam hal penyaluran bantuan kemanusiaan dalam kompleksitas situasi darurat kemanusiaan.

Koordinasi dan komunikasi yang dijelaskan sebelumnya juga di dukung oleh pernyataan Citra (2015, p. 67) dalam bukunya yang menjelaskan bahwa kekuatan utama aksi NGO yakni melalui perluasan secara berkelanjutan dengan mengembangkan jaringan. Citra (2015) menjelaskan pula manfaat yang didapat dari adanya pembentukan jaringan seperti peningkatan akses terhadap informasi, keahlian, sumber daya keuangan, tersedianya solidaritas, dan

dukungan terhadap suatu isu yang diangkat, serta meningkatkan kredibilitas NGO.

Dari uraian diatas, keterkaitan antara konsep yang telah dipaparkan dengan penelitian ini yakni dimana Muhammadiyah merupakan salah satu *national NGO* yang berada di Indonesia turut terlibat dalam aktivitas kemanusiaan berskala global yakni pada peristiwa gempa bumi Nepal tahun 2015 (Aji, 2016). Dalam melaksanakan aktivitasnya, Muhammadiyah melalui *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* melakukan perannya dalam mengkoordinasikan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan pada peristiwa Gempa Nepal tahun 2015 (Rahmawati Husein S. M., 2016). Dalam melaksanakan perannya, Muhammadiyah mengkoordinasikan penyaluran bantuan kemanusiaan dengan pihak pemerintahan negara Nepal termasuk didalamnya pihak militer Nepal, pemerintah lokal yakni Desa Satunggal, organisasi kemanusiaan Internasional seperti UNOCHA, serta sesama NGO yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Hal ini dilakukan Muhammadiyah untuk dapat mencapai tujuan dari misi kemanusiaannya yakni penyaluran bantuan kemanusiaan Indonesia kepada pemerintahan Nepal khususnya masyarakat terdampak bencana yang belum mendapatkan bantuan (Rahmawati Husein S. M., 2016).

2. Konsep Faith-Based Organization (FBO)

Appley dalam Fajriyah (2014) menyebutkan bahwa keterlibatan organisasi keagamaan dalam aktivitas kemanusiaan sudah mulai berkembang pada abad ke 19.

Nick Finney, direktur dari *Humanitarian Response of Save The Children* dalam Bush (2014) mendeskripsikan fenomena pertumbuhan aktor non-negara dalam hal ini organisasi-organisasi keagamaan tidak lebih seperti sebuah paradigma baru dalam respon kemanusiaan. Hal tersebut dijelaskan melalui adanya fenomena meningkatnya penolakan negara dalam hal pemberian bantuan kemanusiaan kepada agen-agen PBB, yang kemudian dinilai sebagai awal terbukanya pintu bagi peran aktif yang dimainkan oleh organisasi non-pemerintahan domestik dan internasional, termasuk didalamnya dijelaskan peran dari organisasi non-pemerintahan Muslim (Bush, 2014).

Peran organisasi keagamaan dalam aktivitas kemanusiaan khususnya dalam bidang kebencanaan dijelaskan dalam artikel yang ditulis oleh Robin Bush (2014) :

“In response, disaster-assistance and humanitarian aid organizations have experienced concurrent growth, and increasing levels of mobilization, professionalization, and institutionalization.” (Bush, 2014, pp. 2-3).

Bush (2014) menjelaskan adanya perkembangan peran organisasi keagamaan terkait respon terhadap bencana yakni seperti pada level mobilisasi, profesionalisasi, dan insitusalisasi. Dalam artikelnya, Bush (2014) tidak memaparkan secara lebih komprehensif perkembangan setiap level yang dimaksudkannya, namun menjelaskan secara umum tentang peran organisasi keagamaan sebagai penghubung bantuan kemanusiaan antara pendonor bantuan kemanusiaan dan pihak yang terdampak bencana. Penjelasan yang dipaparkan Bush (2014) mengenai peran aktor keagamaan dalam level mobilisasi didukung oleh pernyataan yang terdapat dalam draft yang ditulis oleh *World Health Organization (WHO)* yang menjelaskan bagaimana peran sebuah aktor kemanusiaan dalam kebencanaan.

Peran aktor kemanusiaan dalam hal kebencanaan dijelaskan dalam draft yang ditulis *World Health Organization (WHO)* (1998) terkait dengan mobilisasi aktor kemanusiaan dalam peristiwa kebencanaan, kegiatan pemantauan dan mobilisasi aktor kemanusiaan dalam penanggulangan bencana di lapangan pada prinsipnya yakni melaksanakan penilaian lokasi dan kebutuhan serta dampak keselamatan secara cepat (*Rapid Health Assessment*) (World Health Organization, 1998). Hal ini berkaitan dengan aksi selanjutnya yakni penyaluran bantuan kemanusiaan. Peran aktor keagamaan dalam level

profesionalisasi yakni berkaitan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan Internasional seperti yang tersusun dalam draft UNOCHA (2011) yang terdiri dari prinsip kemanusiaan (humanity), netralitas (neutrality), imparsialitas (impartiality), kemandirian (independen). Sehingga dalam melaksanakan perannya harus dapat menerapkan prinsip tersebut. Sedangkan peran aktor keagamaan dalam level institusionalisasi menurut Bush yakni mengenai struktur kelembagaan yang dimiliki oleh aktor keagamaan dalam isu kebencanaan. Hal ini juga berkaitan dengan prinsip kemanusiaan Internasional bahwa setiap aktor kemanusiaan yang berbasis organisasi keagamaan harus berdiri sendiri tanpa adanya diskriminasi yang didasarkan pada agama, etnik, gender, maupun ras tertentu (Bush, 2014).

Dari uraian diatas, perkembangan peran *Faith Based Organization (FBO)* dalam hal ini yakni Muhammadiyah dalam hal respon terhadap bencana di Nepal yakni dalam level mobilisasi dan profesionalisasi. Peran mobilisasi ini berkaitan dengan *Humanitarian Awareness* yang dimiliki Muhammadiyah melalui *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* saat berada di Nepal. Menurut Husein (2016) Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi keagamaan di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam hal memobilisasi seluruh sumber daya yang dimiliki yakni seluruh

bantuan kemanusiaan yang berasal dari Indonesia. Muhammadiyah melalui MDMC mampu mengarahkan seluruh bantuan kemanusiaan yang berasal dari Indonesia dengan melakukan penilaian (*assessment*) secara cepat dan tepat terhadap situasi dan kondisi yang terdapat di wilayah terdampak bencana yakni Nepal, yang kemudian disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia serta seluruh bantuan kemanusiaan yang dimiliki Indonesia. Sehingga tujuan utama dari bantuan kemanusiaan Internasional yang dikirimkan Indonesia melalui perwakilannya yakni *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* berupa pendirian Rumah Sakit Lapangan dapat terlaksana secara tepat sasaran kepada masyarakat terdampak bencana di Nepal yang belum terjangkau oleh pemerintah Nepal (Rahmawati Husein S. M., 2016). Disamping itu, dalam level profesionalisasi dan institusionalisasi, Muhammadiyah sudah memiliki lembaga khusus yakni *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* dan memiliki tim khusus dalam hal respon bencana diluar batas Negara yakni *Emergency Medical Team (EMT)* yang sudah resmi diakui oleh *World Health Organization (WHO)*. Dalam melaksanakan aktivitas kemanusiaannya, MDMC telah menerapkan prinsip kemanusiaan Internasional dan juga sudah memiliki pengalaman dalam melakukan operasi lapangan besar di luar negeri sebelumnya yakni pada peristiwa

Badai Haiyan di Filipina pada tahun 2013 (Rahmawati Husein S. M., 2016). Sehingga dalam peristiwa Gempa Bumi Nepal tahun 2015, Muhammadiyah mampu bekerja lebih optimal melalui perannya dalam hal memobilisasi seluruh bantuan kemanusiaan, serta perihal kesiapan tim relawan yang dikirimkan Muhammadiyah melalui MDMC pada peristiwa tersebut (Rahmawati Husein S. M., 2016).

D. Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah serta didukung oleh dasar pemikiran yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik sebuah hipotesa mengenai peran Muhammadiyah dalam misi kemanusiaan Internasional pada gempa bumi Nepal tahun 2015 yakni :

1. Mengkoordinasikan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada pihak pemerintahan Nepal, organisasi Internasional, dan sesama NGO yang terlibat dalam misi kemanusiaan Internasional pada peristiwa gempa bumi Nepal tahun 2015.
2. Memobilisasi seluruh bantuan kemanusiaan yang berasal dari Indonesia melalui *Emergency Medical Team (EMT)* yang dimiliki Muhammadiyah dalam hal penyaluran bantuan kemanusiaan Internasional pada peristiwa gempa bumi Nepal tahun 2015.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *kualitatif*. Penelitian *kualitatif* merupakan jenis penelitian yang memiliki fokus pada suatu proses dan peristiwa secara interaktif. Dengan menggunakan model atau pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah uraian dan penjelasan secara lebih komprehensif mengenai berbagai aspek.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian *kualitatif* adalah metode dimana adanya data-data yang dikumpulkan yakni berupa kata-kata bukan angka. Sehingga dalam teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dan pemanfaatan dokumen tertulis.

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Tujuannya yakni untuk mengetahui lebih detail peran Muhammadiyah pada misi kemanusiaan Internasional pada peristiwa gempa bumi Nepal tahun 2015.
2. Pemanfaatan dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan media buku pendukung, jurnal, dan artikel serta

media lain yang berbentuk cetak atau elektronik untuk menguatkan data yang ada.

3. Teknik Analisa Data

Kajian ini merupakan kajian *deskriptif-analitik*, yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis peran Muhammadiyah dalam misi kemanusiaan Internasional pada gempa bumi Nepal tahun 2015. Fokus penelitian ini mengarah pada peran yang dilakukan Muhammadiyah dalam menjalankan aktivitas kemanusiaan Internasional khususnya pada peristiwa tersebut.

Tahap awal pelaksanaan penelitian ini, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh data dan gambaran tentang bagaimana sejarah perkembangan Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi keagamaan yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, hal ini akan dijelaskan melalui sejarah terbentuknya Muhammadiyah secara umum, sejarah terbentuknya *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* sebagai lembaga yang bergerak khusus dalam bidang kebencanaan yang dimiliki Muhammadiyah, kemudian akan dijelaskan mengenai keterlibatan *Muhammadiyah Disaster*

Management Center (MDMC) dalam aktivitas kemanusiaan di kancah Internasional.

Pembahasan selanjutnya yakni akan dijelaskan mengenai dinamika kebencanaan di Nepal. Hal ini akan dijelaskan mengenai terjadinya gempa bumi Nepal tahun 2015, kemudian akan dijelaskan lebih detail mengenai dampak dari peristiwa tersebut yang memicu kemunculan beberapa permasalahan, hingga akan dijelaskan mengenai permasalahan terkait mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan Internasional di Nepal.

Pembahasan selanjutnya yakni terkait peran Muhammadiyah melalui *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* pada peristiwa gempa bumi Nepal tahun 2015. Hal ini akan dijelaskan melalui keterlibatan peran MDMC sebagai penghubung yang mengkoordinasikan dengan berbagai pihak dan memobilisasi penyaluran bantuan kemanusiaan dari Indonesia kepada pemerintahan Nepal dengan mengkoordinasikan kepada pihak-pihak yang terlibat pada peristiwa gempa bumi Nepal tahun 2015.

4. Informasi Penelitian

Informasi penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang atau badan yang berkompeten memberi informasi tentang

keterlibatan Muhammadiyah melalui *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* dalam melaksanakan perannya sebagai aktor kemanusiaan pada peristiwa Gempa Nepal tahun 2015 yakni *Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* dan dokter-dokter dari MDMC yang ikut terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan Internasional di Nepal. Informasi tersebut akan didapat melalui proses wawancara langsung (interview) secara terbuka dan juga didukung oleh pemanfaatan data-data yang ada terkait penelitian ini.

5. Jangkauan Penelitian

Pada penelitian ini, akan diberi batasan masalah (*focus interest*) hanya pada peran yang dilakukan Muhammadiyah melalui *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* dalam menjalankan misi kemanusiaan internasional pada peristiwa Gempa Nepal tahun 2015.

F. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah pada umumnya bertujuan untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai suatu fenomena tertentu. Demikian juga dengan penelitian yang akan dilakukan:

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan dan mendeskripsikan peran yang dilakukan Muhammadiyah sebagai salah satu *national non-governmental organization* dalam menjalankan misi kemanusiaan Internasional pada peristiwa gempa Nepal tahun 2015.
2. Menggambarkan dan mendeskripsikan peran yang dilakukan Muhammadiyah sebagai salah satu *faith-based organization* dalam misi kemanusiaan Internasional pada peristiwa gempa Nepal tahun 2015.
3. Menggambarkan dan mendeskripsikan tantangan-tantangan yang dihadapi Muhammadiyah dalam melaksanakan aktivitas kemanusiaan pada peristiwa Gempa Nepal tahun 2015.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat memperoleh uraian atau gambaran mengenai permasalahan yang akan dibahas, maka diperlukan uraian yang sistematis yakni penulis menyajikan penjelasan penelitian melalui per-bab. Di dalam penyusunan tulisan ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari V bab.

Bab I, Pendahuluan. Berisikan mengenai latar belakang keterlibatan Organisasi non-pemerintahan atau organisasi keagamaan mulai bergerak dalam misi bantuan kemanusiaan Internasional, rumusan masalah, kerangka

pemikiran, hipotesis, metode penelitian, jangkauan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, Muhammadiyah sebagai Aktor Kemanusiaan Internasional. Berisikan mengenai sejarah dan perkembangan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan secara umum, kemudian dijelaskan mengenai sejarah terbentuknya *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* sebagai lembaga khusus kemanusiaan yang dimiliki Muhammadiyah, kemudian pada akhir bab ini akan dijelaskan mengenai keterlibatan MDMC sebagai aktor kemanusiaan dalam level internasional.

Bab III, Dinamika Kebencanaan di Nepal. Berisikan mengenai peristiwa gempa bumi Nepal pada tahun 2015, kondisi geografis dan sosial Nepal, hingga permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses penyaluran bantuan kemanusiaan dalam dinamika kebencanaan di Nepal.

Bab IV, Muhammadiyah dalam misi kemanusiaan Internasional pada gempa bumi Nepal tahun 2015. Berisikan mengenai Muhammadiyah melalui *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* sebagai salah satu perwakilan Indonesia dalam misi kemanusiaan Internasional tersebut, kemudian akan dijelaskan mengenai peran koordinasi dan komunikasi, serta perannya dalam memobilisasi terkait proses penyaluran bantuan kemanusiaan Internasional Indonesia dengan berbagai pihak-pihak Internasional maupun lokal yang terlibat dalam peristiwa tersebut di Nepal.

Bab V, Penutup. Berisikan mengenai kesimpulan dari analisa yang telah dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang dipaparkan, pemaparan tujuan penelitian, serta adanya rekomendasi atau saran jika diperlukan.

BAB II

MUHAMMADIYAH SEBAGAI AKTOR KEMANUSIAAN INTERNASIONAL

Menurunnya peran negara dalam keterlibatannya pada aktivitas kemanusiaan menjadi penyebab mulai munculnya peran aktor-aktor kemanusiaan non-negara yang dinilai selalu siap dan aktif dalam situasi tanggap darurat kemanusiaan. Adapun aktor-aktor non-negara yang mulai tumbuh yakni seperti, Organisasi Internasional, Organisasi non-pemerintahan (NGO), Organisasi Keagamaan (FBO), kelompok-kelompok kepentingan (*Interest Group*) dan beberapa aktor-aktor lainnya.

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi non-pemerintahan (NGO) lokal/nasional sekaligus Organisasi Keagamaan (FBO) yang berdiri secara independen tanpa campur tangan dari pihak pemerintahan/negara. Keterlibatan Muhammadiyah sebagai *local/national NGO* yang bergerak dalam bidang kemanusiaan tidak hanya berperan dalam aktivitas kemanusiaan didalam negeri, namun juga aktif terlibat dalam aktivitas-aktivitas kemanusiaan pada level global.

A. Sejarah Muhammadiyah

Bulan Dzulhijjah tepatnya pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau yang bertepatan pada tanggal 18 November 1912 M merupakan momentum penting

lahirnya Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia yang melakukan perintisian atau kepeloporan pemurnian sekaligus pembaruan Islam di negeri berpenduduk terbesar muslim di dunia (Pimpinan Pusat Muhammadiyah). Muhammadiyah didirikan oleh seorang kyai alim, cerdas, dan berjiwa pembaru, yakni Kyai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis di Kampung Kauman, Yogyakarta (Majelis Diklitbang dan LPI PP Muhammadiyah, 2010).

K.H. Ahmad Dahlan (1868-1923) merupakan seorang anak yang lahir dari seorang bapak, K.H. Abu Bakar (seorang Khatib Masjid Besar Kauman Yogyakarta) dan ibu Siti Aminah. Muhammad Darwis (nama kecil Ahmad Dahlan) tumbuh dalam lingkungan kampung Kauman yang religius. K.H. Ahmad Dahlan adalah pribadi yang memiliki kekhasan tersendiri yang lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta. Kekhasan K.H. Ahmad Dahlan yakni usahanya melakukan pembaruan yang berjalan secara berkemajuan tanpa melalui pendahuluan atau prakondisi tertentu sebelumnya. Selain itu, K.H. Ahmad Dahlan termasuk pribadi yang selalu gelisah melihat praktek keagamaan umat Islam pada masanya, ia selalu memikirkan bagaimana cara atau metode yang digunakan untuk memahami ajaran Islam agar nilainya dapat menjadi semangat umat Islam untuk melakukan perubahan sosial keagamaan bagi kepentingan masyarakat luas.

Gagasan pembaruan Muhammadiyah pada berbagai bidang kehidupan tidak bisa dilepaskan dari kepribadian K.H. Ahmad Dahlan, ia merupakan pribadi yang rasional dengan suatu pendirian yang kuat untuk terus menerus mencari kebenaran yang hakiki, kebenaran yang didasarkan pada akal (rasional) dan wahyu, dengan bekal ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama menunaikan ibadah haji, baik ibadah haji untuk yang pertama kali yakni tahun 1889 maupun ibadah hajinya yang kedua yakni pada tahun 1903 (Majelis Diklitbang dan LPI PP Muhammadiyah, 2010). K.H. Ahmad Dahlan juga sempat bermukim di Timur Tengah selama 20 bulan. K.H. Ahmad Dahlan tidak memiliki pengalaman pendidikan Barat, tetapi memberi ruang yang luas bagi gerbang rasionalitas melalui ajaran Islam (Mejelis Diklitbang dan LPI PP Muhammadiyah, 2010).

Semangat rasionalitas K.H Ahmad Dahlan tidak bisa dilepaskan dari gerakan pembaruan yang tengah berlangsung di Timur Tengah yang diprakaraisai oleh Djamaluddin Al-Afghani, Muhammadah Abduh, dan Rasyid Ridha serta tafsir Al-Manar, inilah yang menginspirasi gerakan pembaruan Ahmad Dahlan dan ia membuka pintu ijtihad seluas-luasnya dan menolak segala bentuk taklid, takhayul, bid'ah dan khurafat (Mejelis Diklitbang dan LPI PP Muhammadiyah, 2010).

Setelah ayahnya yakni K.H Abu Bakar wafat, K.H Ahmad Dahlan diangkat sebagai Khatib Amin oleh Keraton Yogyakarta untuk Masjid Besar

Kauman Yogyakarta, menggantikan posisi ayahnya pada masa itu. Pada periode 1898-1910 ini merupakan masa-masa perjuangan K.H.Ahmad Dahlan yang penuh dengan lika-liku kehidupan. Sejak menjadi khatib Amin, Ahmad Dahlan melakukan beberapa tindakan yang pada saat itu dianggap menyimpang oleh para khatib lainnya. Bermula sejak gagasannya untuk membenarkan arah kiblat di Masjid Besar Kauman ditolak, dianggap sebagai Kiai kafir, hingga surau yang dimilikinya di hanguskan. Namun, dari semua rintangan yang dihadapinya tidak menjadikan semangat yang dimiliki K.H Ahmad Dahlan meredup. Beliau tetap semangat dalam menghembuskan nafas pembaruan untuk menunjang perjuangan yang dilakukannya demi kemurnian agama Islam.

Setelah berdiskusi dengan para murid sekaligus para sahabatnya, maka diambillah sebuah keputusan untuk mendirikan persyarikatan dengan nama Muhammadiyah (Febriansyah & dkk, 100 Tahun Muhammadiyah Menyinari Negeri, 2013). Surat Al-Imran ayat 104 merupakan salah satu inspirasi K.H Ahmad Dahlan dalam mengorganisir umat untuk berdakwah amar ma'ruf nahi munkar (mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran) yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-sunah. Surat Al-Ma'un ayat 1 hingga 7 adalah pedoman Muhammadiyah dalam menjalankan setiap aktivitas sosial, sesuai pesan pendiri Muhammadiyah. Setiap harinya K.H. Ahmad Dahlan mengajarkan kepada muridnya mengenai Ayat Al-Qur'an tersebut, tidak

hanya menghafalkannya dan mengerti artinya, namun juga memaknai isi kandungan dalam Surat Al-Ma'un dan dapat mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Teologi Al-Ma'un inilah yang nantinya menjadi dasar kuat bagi setiap aktivitas yang dilakukan Muhammadiyah dalam menanamkan semangat bersosial pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan sosial yang dimiliki Muhammadiyah bersifat inklusif, yakni mendukung dialog bersama serta keragaman beragama, sesuai dengan pesan yang diajarkan oleh pendiri Muhammadiyah (Pimpinan Pusat Muhammadiyah). Sehingga dalam menjalankan aktivitas sosial, Muhammadiyah terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang golongan bahkan agama. Hal tersebut dilakukan agar Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan dapat melebur bersama dengan masyarakat dipenjuru negeri bahkan dunia (Pimpinan Pusat Muhammadiyah).

Sejarah awal gerakan sosial Muhammadiyah sudah begitu jelas dengan kepedulian Muhammadiyah terhadap kaum tertindas, kaum dhuafa, dan yang dalam wacana sosial lebih dikenal sebagai kaum proletar (Majelis Diklitbang dan LPI PP Muhammadiyah, 2010). Dalam hal ini, legenda dari Teologi Al-Ma'un memperoleh pembenaran dan kesaksian faktual seperti halnya pada masa itu kegiatan perempuan Muhammadiyah menyantuni pekerja migran dari sekitar kota Yogyakarta dengan pemberian keterampilan kerja sekaligus bekal kepribadian. Kebesaran Muhammadiyah hingga saat ini lebih terletak

pada amal nyata, yaitu amal usaha-amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah. Saat ini tercatat amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah seperti 8000 Sekolah mulai dari TK hingga SMA, 67 Pondok Pesantren, 172 Perguruan Tinggi, 457 Rumah Sakit, 82 Rehabilitasi Cacat, 6118 Masjid dan masih banyak lagi (Pimpinan Pusat Muhammadiyah). Muhammadiyah bergerak hampir disemua lini kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perannya cukup berpengaruh di Indonesia.

Salah satu keunggulan yang dimiliki Muhammadiyah adalah kemampuannya untuk mengembangkan jaringan bahkan sampai ke manca negara. Saat ini sudah terbentuk 13 Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM). Di benua Asia, terdapat PCIM Malaysia, PCIM Jepang, PCIM Iran, dan PCIM Islamabad, Pakistan. Sementara di benua Afrika Muhammadiyah terwakili dengan berdirinya PCIM di Kairo/Mesir, Libya, dan Sudan. Di benua Eropa telah berdiri PCIM United Kingdom (Inggris Raya), PCIM Prancis, PCIM Jerman, dan PCIM Belanda. Kemudian di benua Amerika dan benua Australia masing-masing telah berdiri PCIM Amerika dan PCIM Australia (Febriansyah & dkk, 100 Tahun Muhammadiyah Menyinari Negeri, 2013).

B. Sejarah Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)

Dalam bidang kemanusiaan, Lembaga pembantu pimpinan Muhammadiyah yang pertama kali dibentuk adalah PKO (U) yang waktu itu sebagai akronim Penolong Kesengsaraan Oemoem. Dalam Mulkhan (2010) memaparkan bahwa sejarah ini bermula saat kegelisahan Haji Muhammad Syudjak, seorang santri dan teman dekat K.H. Ahmad Dahlan merenung dan terbayang tentang surat Al-Ma'un yang berulang-ulang diajarkan oleh K.H. Ahmad Dahlan atau jumlah anaknya yang banyak diminta kembali oleh Allah setelah dipinjamkan kepadanya. Hingga pada akhirnya tahun 1920an, muncul sebuah ide yang dimiliki oleh Haji Syudjak untuk membuat rumah sakit, rumah miskin, dan rumah yatim. Pada akhirnya setelah melakukan diskusi serta dukungan penuh dari K.H. Ahmad Dahlan, berdirilah Rumah Sakit PKO Muhammadiyah di jalan Ngabean. Lembaga ini merupakan salah satu manifestasi Muhammadiyah dalam bidang kemanusiaan pada abad pertama yakni berdiri pada tahun 1920-1936 (Nurkhasanah, 2014). Pada saat ini, lembaga tersebut telah berkembang menjadi rumah sakit PKU Muhammadiyah yang sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Pada abad kedua, Muhammadiyah kembali mendirikan lembaga khusus dalam bidang kemanusiaan yakni Badan Penanggulangan Bencana (LPB) atau yang dapat disebut dengan *Muhammadiyah Disaster management Center (MDMC)* yang berdiri sejak tahun 2010 hingga saat ini. Menurut

Rahmawati Husein (2016) menyampaikan bahwa pada awalnya aksi kemanusiaan Muhammadiyah masih berupa aksi tanggap darurat dan *ad hoc committee* (pendirian posko secara mandiri pada saat terjadi bencana). Dalam Pedoman Mekanisme Kerja MDMC (2012) menjelaskan bahwa semangat Al-Ma'un yang merupakan dasar pijakan dalam pengembangan awal gerakan "PKO-Penolong Kesengsaraan Oemoem" tahun 1912 sudah saatnya diterjemahkan kembali sebagai basis dalam gerakan penanggulangan bencana. Adapun visi pada periode awal yang berbunyi memajukan dan menggembirakan hidup yang berdasarkan pada nilai-nilai agama Islam memberikan semangat yang khas. Tujuan inilah yang kemudian mencoba membangun sebuah gagasan betindak bahwa kemajuan haruslah membawa kegembiraan, khususnya bagi anak-anak yang tidak terlindungi (yatim) dan kelompok miskin (inti surah Al-Ma'un). Hal inilah yang kemudian dianggap sebagai perbedaan yang cukup mendasar dengan keadaan masyarakat sosial modern saat ini yang mengartikan sebuah kemajuan pasti memiliki hasil berupa penderitaan dan keterasingan bagi sebagian atau bahkan masyarakat luas, ataupun menghasilkan sebuah ketimpangan hidup dalam kehidupan masyarakat.

Menurut mantan ketua PP Muhammadiyah tahun 2005-2010 Dr. Sudibyo Markus dalam Pedoman Mekanisme Kerja MDMC (2012), Muhammadiyah menghadapi berbagai macam hambatan dalam

mengimplementasikan semangat Al-Ma'un pada situasi sosial modern pada saat ini seperti pertama, Hambatan Kultural. Hambatan kultural yang dimaksudkan yakni adanya tarik menarik antara *political disengagement dan civic engagement*. Kedua, hambatan struktural yakni organisasi Muhammadiyah yang terlalu besar. Ketiga, hambatan paradigmatik yakni dalam pelaksanaan fungsi khafilah. Terakhir, hambatan programtik dimana Muhammadiyah terjebak dalam kegiatan kelembagaan, kurang fokus pada pendekatan "ummah" atau umat (masyarakat luas) (Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah, 2012).

Padahal seperti pesan pendiri dari Muhammadiyah, bahwasanya sejak awal berdirinya Muhammadiyah menyiratkan konsep inklusivitas total dan universal sesuai dengan semangat Islam sebagai rahmat bagi seluruh semesta. Dari hambatan tersebut, kemudian terdapa dua prioritas Muhammadiyah dalam membumikan konsep masyarakat Islam sebenar-benarnya (Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah, 2012). Hambatan tersebut yakni yang pertama *Back to Basics* (peningkatan kapasitas lokal/komunitas/akar rumput) dan *Go International*. Keduanya saling berkaitan dengan peristiwa yang terjadi ditingkat global dengan akar rumput (*out there phenomena dengan in here phenomena*).

Dalam Pedoman Mekanisme Kerja MDMC (2012) pada tahun 2007 Pimpinan Pusat Muhammadiyah membentuk Pusat Penanggulangan Bencana

dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 58/KEP/I.0/2007 tentang penetapan Pengurus dengan ketua Dr. H.M. Natsir Nugroho, Sp. OG, M.Kes. Pembentukan ini berdasarkan rekomendasi Internal Pasal 1 keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke 45 tahun 2005. Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah (Muhammadiyah Disaster Management Center – MDMC) yang telah dirintis pada tahun 2007 berdasarkan pada Surat Keputusan Nomor: 58/KEP/I.0/2007 berdasarkan pada rekomendasi internal yang terdapat dalam pasal 1 keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke 45 tahun 2005. Pada Mukhtar ke 46 pada tahun 2010, LPB diubah dan ditetapkan menjadi *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)*. (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010)

MDMC bergerak dalam kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan definisi kegiatan penanggulangan bencana baik pada kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan juga Rehabilitasi. MDMC mengadopsi kode etik kerelawanan kemanusiaan dan piagam kemanusiaan yang berlaku secara Internasional, pelaksanaan aktivitas diarahkan pada pendekatan Manajemen Bencana yang merujuk pada Kerangka Aksi *Hyogo Framework for Action* untuk mengupayakan pengurangan risiko bencana sebagai inisiatif global dalam kegiatan penanggulangan bencana, serta mengembangkan basis kesiapsiagaan di tingkat komunitas, sekolah dan rumah

sistem penanggulangan bencana, dan usaha-usaha lain dalam program rehabilitasi pasca tanggap darurat yang tersistem dengan program dan prinsip-prinsip gerakan Muhammadiyah.

2. Meningkatkan dan mengoptimalkan sistem penanggulangan bencana dalam bentuk jejaring simpul-simpul tanggap darurat, rehabilitasi bencana di lingkungan Muhammadiyah dalam penanggulangan bencana; peningkatan kapasitas kader, relawan, dan pengelola penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan keterpaduan dan kesiapan UMKESOS dan Rumah Sakit dalam penanggulangan bencana, peningkatan kualitas tanggap darurat (response time dan mobilisasi), peningkatan kualitas manajemen dan pengadaan logistic tanggap darurat, serta advokasi dan rehabilitasi pasca bencana.

Pada pelaksanaannya, program pengembangan diatas, dirumuskan dalam ciri pengembangan yang terdiri dari Sistem Gerakan, Organisasi dan Kepemimpinan, Jaringan, Sumberdaya, dan Aksi Pelayanan (Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah , 2015).

Dalam pengembangan sistem gerakan MDMC membuat sebuah naskah yakni Fikih Penanggulangan Bencana yang dikembangkan bersama dengan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah (Lembaga Penaggulangan Bencana PP Muhammadiyah, 2012). Pandangan terkini masyarakat luas mengenai

Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah, 2012). Secara terbatas telah dikembangkan pula pusat logistic nasional di Yogyakarta beserta mekanismenya dan inisiasi terbatas pusat pendidikan dan pelatihan melalui kerjasama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah dan Majelis Pembina Kesehatan Umum. (Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah, 2012)

Dalam pengembangan Sumberdaya, MDMC mengadakan pelatihan relawan Muhammadiyah melalui pengembangan kurikulum, silabus dan modul pelatihan, pelatihan relawan kesehatan, pelatihan SAR, psikososial, logistic dan juga pendidikan, pelaksanaan gladi kesiapsiagaan regional dan latihan gabungan relawan yang telah dilaksanakan baik di tingkat nasional, serta pengadaan perlengkapan kegiatan tanggap darurat di tingkat nasional bersama Lembaga Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). MDMC juga mengadakan penguatan kompetensi di luar negeri melalui pelatihan di Bangkok, Singapura, dan Kuala Lumpur. Kerjasama pengadaan perangkat operasi juga dilakukan dengan relasi dari luar negeri seperti Palang Merah Singapura. Kerjasama penguatan kompetensi khususnya bidang kesehatan juga bekerjasama dengan lembaga luar negeri melalui program AIFDR yang merupakan kerjasama Pemerintah Australia dan BNPB (Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah, 2015).

Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah , 2015). Muhammadiyah melalui MDMC juga berperan sebagai pimpinan Humanitarian Forum Indonesia, serta aktif dalam koordinasi Kluster Kesehatan dan koordinasi Kluster Pendidikan (Rahmawati Husein S. M., 2016).

Kegiatan yang lain berupa aktifnya dalam upaya advokasi kebijakan seperti upaya penerbitan kebijakan tentang Fasilitas Kesehatan yang aman dari Kedaruratan dan Bencana bersama Kementerian Kesehatan, upaya penerbitan kebijakan Sekolah Aman bersama Kementrian Pendidikan. Pengembangan jaringan di internal Muhammadiyah, seperti adanya komunikasi aktif dengan mengerjakan program bersama di lapangan secara terbatas seperti dengan majelis tarjih mengembangkan fikih penanggulangan bencana, majelis lingkungan hidup mengembangkan rehabilitasi lingkungan merapi, majelis pendidikan tinggi mengembangkan inisiasi pusat studi dan penelitian penanggulangan bencana, majelis Pembina kesehatan umum mengembangkan Rumah Sakit Siaga Bencana dan penguatan kemampuan manajemen kedaruratan dan bencana bagi karyawan rumah sakit, majelis pemberdayaan masyarakat mengembangkan rehabilitasi pertanian dan ekonomi, serta adanya kerjasama dengan LAZISMU yang merupakan lembaga zakat, infaq, dan sedekah yang dimiliki Muhammadiyah dalam mengembangkan sistem fundrising penanggulangan bencana dan bantuan

kemanusiaan serta penerapan sekolah siaga bencana (Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah, 2015).

Dalam buku pedoman struktur, organisasi, dan mekanisme kerja MDMC (2015) menjelaskan bahwa terdapat mekanisme yang mengatur sistem kerjasama penanggulangan bencana. Sistem kerjasama penanggulangan bencana ini terbagi menjadi sistem kerjasama lembaga dalam lingkungan organisasi Muhammadiyah, sistem kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, sistem kerjasama dengan pemerintah luar negeri dan lembaga PBB, sistem kerjasama dengan perusahaan, serta sistem kerjasama dengan Masyarakat Sipil dan Perguruan Tinggi. Kerjasama dengan segala pihak didasarkan pada prinsip-prinsip kemartabatan sebagai bangsa, saling menghormati, dan kesetaraan, serta adanya salinan kontrak yang harus terdapat pada Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sedangkan kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, meliputi penyiapan dukungan kebijakan, Data dan Informasi, Pendanaan, dan *Resource person (Expert)*. Adapun lingkup kerjasama dengan Pemerintah asing dititik beratkan pada sharing informasi, dukungan pendanaan, dukungan Expert, dan pertukaran pengetahuan. Dalam kerjasama dengan Perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri difokuskan pada dukungan pendanaan, dukungan Expert, dukungan peralatan, dan dukungan manajemen informasi. Terdapat catatan khusus dalam kerjasama dengan Perusahaan, yakni perusahaan yang tidak merusak

lingkungan, perusahaan yang tidak memberi dampak pada masyarakat khususnya anak, perusahaan yang tidak menindas buruh dan memperkerjakan anak-anak. Kemudian kerjasama dengan Masyarakat sipil Internasional meliputi dukungan pendanaan, dukungan Expert, dukungan relawan, dan jaringan kerjasama. Sedangkan kerjasama dengan Masyarakat sipil Indonesia meliputi dukungan pendanaan, dukungan expert, dukungan relawan, jaringan (networking), pemberdayaan komunitas, pengembangan metodologi pengelolaan bencana, advokasi, publikasi dan sharing informasi (Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah , 2015). Dan yang terakhir yakni kerjasama dengan perguruan tinggi meliputi kerjasama riset, expert, pendidikan dan pelatihan, dan mobilisasi Relawan.

Adapun keterlibatan aktor-aktor diluar keanggotaan Muhammadiyah dapat dilihat dari berbagai macam bentuk kerjasama atau kolaborasi dalam aktivitas kemanusiaan universal sebagai berikut:

Tabel 2.1 Organisasi Internasional yang Berkolaborasi dengan Muhammadiyah pada tahun 2004-2010

Kategori	Aktor	Area Aktivitas	Peristiwa Bencana
Organisasi Berbasis Agama (FBOs)	Father Chris Riley's Youth Off the Street (YOT) Australia	Child Safety/Panti Asuhan	Tsunami Aceh 2004
	Catholic Relief Service	Peralatan kesehatan/Rekonstruksi klinik	Tsunami Aceh 2004
	Islamic Relief	Respon tanggap darurat	Tsunami

			Aceh 2004
	World Vision International	Pendidikan	Tsunami Aceh 2004
		Family Kits Mata pencaharian berkelanjutan	Erupsi Merapi dan Gempa Yogyakarta 2006
	Won Buddhism, Korea	Hunian sementara	Gempa Yogyakarta 2006
		Kursi roda dan kruk	
	Knight of Malta – Singapore	Selimut – respon tanggap darurat	Erupsi Gunung Merapi 2010
	World Islamic Call Society, Libya	Bahan pangan - beras	Gempa Yogyakarta 2006
Lembaga Internasional (Pemerintah)	Pemerintah Australia – Ausaid	Pendidikan	Gempa Yogyakarta 2006
		Respon tanggap darurat	Gempa Sumatra Barat, Erupsi Gunung Merapi
	Pemerintah Jepang – JICA	Ambulans/kesehatan	Tsunami Aceh 2004
	Pemerintah Amerika Serikat – USAID	Pembersihan reruntuhan – dalam bentuk tunai untuk program kerja	Tsunami Aceh 2004
	Negara-negara Arab (Saudi Arabia, Oman)	Makanan, pakaian , perlengkapan kebersihan, dan perlengkapan sholat	Tsunami Aceh 2004
Lembaga UN – Institusi Internasional (bilateral dan multilateral)	UNICEF	Pusat Nutrisi Anak, perlengkapan kebersihan	Tsunami Aceh 2004 dan Gempa Yogyakarta 2006
	IOM	Evakuasi dan transportasi logistik	Tsunami Aceh 2004

	UNFPA	Respon tanggap darurat	Tsunami Aceh 2004
	UN- WFP	Makanan	Tsunami Aceh 2004
	Islamic Development Bank	Rekonstruksi	Gempa Yogyakarta 2006
NGOs Internasional	Direct Relief International	Dukungan Kesehatan : obat-obatan dan peralatan medis/ambulans	Tsunami Aceh 2004
			Gempa Yogyakarta 2006
			Gempa Sumatra Barat 2009
			Erupsi Gunung Merapi 2010
	The Asia Foundation (TAF)	Operasi Tanggap Darurat, Stasiun Radion	Tsunami Aceh 2004
	Give2Asia	Tim Medis, Microfinance, rekonstruksi sekolah	Tsunami Aceh 2004
			Gempa Yogyakarta 2006
	Mercy Relief Singapore	Rekonstruksi Sekolah	Tsunami Aceh 2004
	OXFAM	Suplai Air dan sanitasi, tunai untuk program kerja	Tsunami Aceh 2004
	Basic Human Need (BHN)	Transitor radio	Tsunami Aceh 2004
International Red Crescent (IRC)	Makanan	Tsunami Aceh 2004	

Sumber : Husein dalam Fajriyah (2014, pp. 39-41)

C. Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Sebagai Aktor Kemanusiaan Internasional

Dalam Farjriyah (2014) menjelaskan bahwa perkembangan isu kemanusiaan semakin terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dunia internasional semakin di sibukkan dengan berbagai isu kemanusiaan yang tidak kunjung usai. Salah satu isu kemanusiaan yang berkembang saat ini yakni pengurangan/penanggulangan resiko bencana. Hal ini mengharuskan setiap aktor untuk meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dan aksi nyata. Untuk merespon hal ini, peningkatan kapasitas individu dan masyarakat terhadap dampak resiko bencana menjadi fokus utama aktor kemanusiaan-kebencanaan sebagai proses Pengurangan Resiko Bencana.

Peran Muhammadiyah dalam aktivitas kemanusiaan Internasional semakin meningkat setiap tahunnya. Di dunia Internasional Muhammadiyah dianggap sebagai pilar Islam Moderat dan tonggak demokrasi di Indonesia. Dalam Fariyah (2014) menjelaskan bahwa pada tahun 2006 bersama berbagai NGOs kemanusiaan, Muhammadiyah membentuk Forum Kemanusiaan Internasional di London. Banyak yang ingin membantu dan bekerjasama, salah satunya organisasi-organisasi yang tergabung dalam Humanitarian Forum Indonesia (HFI). Isu bencana dalam *community based disaster reduction management* (CBDRM) merupakan bagian dari strategi makro Muhammadiyah sebagai *Islamic Society/Civil Society* yang bertempu pada

konsep surat Al-Ma'un, yang mengandung proses seperti Kariatif, Pemberdayaan, Takaful (modal sosial), Ketahanan sosial, dan Masyarakat yang beradab (*civil society*) (Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah, 2012). Muhammadiyah melalui MDMC juga ikut terlibat dalam forum-forum Internasional.

Keterlibatannya dalam merespon peristiwa kebencanaannya tidak hanya di dalam negeri, namun juga di luar batas negara. Selama berkelut dalam bidang penanggulangan bencana alam, Muhammadiyah melalui MDMC pernah ikut terlibat langsung dalam beberapa kejadian bencana alam yang melanda wilayah di luar batas negara atau pengiriman medis Internasional. Pertama yakni pada kejadian bencana alam Topan Haiyan di Filipina, Muhammadiyah Disaster Management Center(MDMC) ikut terlibat dalam proses penanggulangan bencana tersebut. Menurut Dr. Corona (2016), salah satu dokter yang ikut terlibat dalam peristiwa tersebut menjelaskan bahwa Muhammadiyah hadir secara Independen ke wilayah terdampak bencana di Filipina, hal tersebut dikarenakan pemerintah Indonesia tidak mengirimkan tim medisnya ke wilayah tersebut. Kedua, yakni pada kejadian bencana alam Gempa di Nepal. Pada peristiwa ini, Muhammadiyah bekerjasama dengan pemerintahan Indonesia dalam pengiriman bantuan kemanusiaan Internasional. Muhammadiyah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dompet

Dhuafa, dan lain-lain merupakan perwakilan yang didelegasikan pemerintah Indonesia ke Nepal (2016).

Selain aktif berperan dalam misi bantuan kemanusiaan dalam diskursus kebencanaan di dunia Internasional, Muhammadiyah melalui MDMC juga aktif berperan sebagai peserta pelatihan dalam forum-forum Internasional. Selain menjadi peserta pelatihan, MDMC kerap diundang sebagai pembicara, fasilitator, hingga pelatih dalam pelatihan yang diadakan oleh lembaga-lembaga Internasional seperti PBB, UNICEF, UNOCHA, Pemerintahan Australia, dan NGO Internasional seperti Direct Relief International, Help Age International, dan Word Vision (Aji, MDMC dalam kemanusiaan Interanasional, 2016). Hal tersebut merupakan sebuah bukti kepercayaan masyarakat luas bahkan dunia kepada keberhasilan pelaksanaan program atau aktivitas manajemen kebencanaan yang dimiliki oleh *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)*. Muhammadiyah melalui MDMC juga merupakan satu-satunya lembaga kemanusiaan sudah memiliki *Emergency Medical Team (EMT)* yang belum dimiliki oleh satupun lembaga kemanusiaan di Indonesia, hal ini mendapatkan pengakuan langsung dari *World Health Organization (WHO)* (Aji, MDMC dalam kemanusiaan Interanasional, 2016). Dalam Program Rumah Sakit Aman yang telah dirintis oleh MDMC sejak tahun 2008, MDMC bekerjasama secara intensif dengan

pemerintahan Australia (Australian Aid) hingga saat ini (Aji, MDMC dalam kemanusiaan Interanasional, 2016).

Kehadiran *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* semakin meningkat dalam kancah Internasional. Selain sukses dalam kegiatan tanggap bencana internasional, seperti Gempa di Nepal, Topan Haiyan di Filipina, dan berbagai pengalaman dalam bidang kerelawanan di berbagai tempat, keterlibatan Muhammadiyah melalui MDMC juga dipercayai oleh ajang kesiapsiagaan bencana berskala besar. MDMC dipercayakan mengikuti "*The International Conference on the implementation of the Health Aspects of Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2015-1030*" yang diselenggarakan oleh United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) di Bangkok, Thailand pada 10 Maret 2016 hingga 11 Maret 2016 (Suara Muhammadiyah, 2016). Dalam konferensi internasional tersebut, MDMC memaparkan argumentasinya terkait pengurangan risiko bencana sesuai dengan konsep yang dimiliki oleh MDMC sendiri. Konferensi tersebut menghasilkan sebuah dokumen Pengurangan Risiko Bencana Bidang Kesehatan (PRB Kesehatan) yang kemudian dikenal sebagai Bangkok Principles (Suara Muhammadiyah, 2016).

Pada bulan Mei tahun 2016 MDMC melalui perwakilnya Dr. Rahmawati Husein ditunjuk sebagai salah satu Sterling Commite dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kemanusiaan Dunia atau World

Humanitarian Summit (WHS) yang berlangsung di Istanbul, Turki pada tanggal 23-24 Mei 2016 (Suara Muhammadiyah, 2016). Pertemuan tersebut merupakan prakarsa Sekjen PBB Ban Ki Moon untuk menyatukan masyarakat dunia dalam menegaskan kembali solidaritas pada orang-orang yang terdampak krisis dan komitmen pada kemanusiaan (Suara Muhammadiyah, 2016). KTT Kemanusiaan tersebut ditujukan untuk bertukar pengalaman serta menunjukkan inovasi dan praktik terbaik dari berbagai pihak pelaku kemanusiaan. KTT tersebut juga mendiskusikan peran organisasi berbasis keagamaan dalam upaya kemanusiaan baik untuk perdamaian, saat perang dan konflik, saat bencana serta peluang pendanaan dari masyarakat Islam baik dari zakat, infaq, dan shodaqoh. Pada kesempatan tersebut, MDMC membagikan buku Fikih Kebencanaan yang merupakan dasar dan panduan kerja MDMC dalam melaksanakan aktivitas Kemanusiaan. Dalam pertemuan tersebut, MDMC membagikan buku tersebut dengan edisi bahasa Inggris yakni "*Coping With Disaster : Principle Guidance from an Islamic Perspective*" kepada seluruh peserta KTT. Hal tersebut dilakukan MDMC untuk menunjukkan adanya kontribusi pemikiran masyarakat Islam terhadap pentingnya memahami bencana dan menunjukkan nilai-nilai Islam sebagai dasar dan prinsip dalam memberikan bantuan kemanusiaan (Rahmawati Husein S. M., 2016).

Pada bulan November tahun 2016, MDMC kembali mengikuti Konferensi Tingkat Menteri Asia di Vigyan Bhawan. Konferensi tersebut bertopik “*Disaster Preparedness for Effective Response and to Build Back Better*”. Dalam konferensi tersebut MDMC diminta untuk menyampaikan program Rumah Sakit Aman yang telah dirintis oleh MDMC sejak tahun 2008. MDMC menyampaikan bahwa program Rumah Sakit Aman yang dilakukan MDMC, didasarkan kepada konsep *Comprehensive Safe Hospital* bagi kapasitas fasilitas kesehatan dan komunitas disekitarnya. Konferensi tersebut dihadiri oleh Prof. Dr. Win Myat Aye (Menteri Kesejahteraan Sosial Pemerintah Myanmar), Krishna Raut (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Pemerintah Nepal), Yukimoto Ito (Wakil Walikota Sendai – Jepang), Brendan Moon (Kepala Eksekutif Badan Pemulihan Pemerintah Queensland), dan Bolorma Nordov (Sekjend Palang Merah Mongolia). (Suara Muhammadiyah, 2016)

D. Kendala Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) sebagai aktor kemanusiaan Internasional

Dalam menjalankan aktivitas-aktivitas kemanusiaan Internasional, tentunya setiap aktor kemanusiaan menghadapi berbagai masalah. Hal tersebut sama halnya dengan *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* menghadapi berbagai macam kendala dalam hal keterlibatannya dalam aktivitas kemanusiaan di luar batas negara. Permasalahan yang

dihadapi tidak hanya datang dari faktor internal namun tidak menutup kemungkinan masalah juga datang dari faktor external.

Kendala-kendala yang dihadapi Muhammadiyah melalui *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* dalam melaksanakan aktivitas kemanusiaan Internasional dipetakan menjadi dua yakni kendala internal dan kendala external. Kendala internal yang dihadapi seperti, keterbatasan dana yang dimiliki Muhammadiyah, dimana dana yang dimiliki Muhammadiyah yakni berasal dari khas bulanan anggota dan Zakat, Infaq, Sedekah yang masih tersebar dalam masyarakat luas melalui lembaga penggalangan dana Muhammadiyah yakni LAZISMU (Latief, 2017). Adapun kendala mengenai keterbatasan dana yang dimiliki MDMC dalam melaksanakan aktivitas kemanusiaan Internasional ini mengingat bahwa MDMC merupakan lembaga khusus dalam bidang kebencanaan yang belum lama hadir dalam dunia Internasional. Selain itu, kendala internal yang dihadapi seperti keterbatasan tim relawan MDMC yang belum begitu mahir dalam hal berbahasa asing khususnya bahasa Inggris (Rahmawati Husein S. M., 2016). Hal ini mengingat bahwa bahasa merupakan salah satu alat yang sangat penting dalam hal komunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas kemanusiaan Internasional.

Sedangkan kendala external yang dihadapi Muhammadiyah seperti, keterbatasan peran aktor non-negara dalam melaksanakan aktivitas

kemanusiaan di luar batas negara, hal ini terkait dengan beberapa mekanisme dan prosedur yang dimiliki oleh Pemerintahan Indonesia yang harus dipenuhi oleh aktor kemanusiaan dalam melaksanakan aktivitasnya di luar batas negara. Serta adanya prosedur atau mekanisme Internasional yang dimiliki oleh sebuah negara terkait mekanisme penerimaan bantuan kemanusiaan dari luar negeri.